

PEMBERDAYAAN WANITA MENDUKUNG STRATEGI GENDER MAINSTREAMING DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERDESAAN

Woman Empowerment to Support Gender Mainstreaming in Rural Agricultural Development Policies

Roosganda Elizabeth

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70. Bogor 16161*

ABSTRACT

Modernization paradigm in the implementation of agricultural development has caused various changes in rural society, namely changes in social life, culture, politic, and especially economic structure in rural areas. This phenomenon also caused trend of disintegration and discrimination in "labor division" between male and female in various fields which could potentially set aside or even eliminate the important productive function of woman. This article is aimed at the description of many thoughts and ideas (by theory) about the role and the opportunity of woman who work in agriculture and repositioning the strategy of gender mainstream within the rural agricultural development policies. The double role of women is clearly indicating the importance of the double sources of income for a household. Women potentials, either as a housewife or as an individual of agricultural worker is the important factor to determine the success of gender mainstreaming strategy. The empowerment is suggested through applied and innovative technology, protection of working woman, improvement of training and extension activities, enhancement of regulations, facility support, increasing wage rate, and household industry skill development. Job opportunity is suggested to balance between male and female and encourage woman to participate in various development activities. With this, the gender mainstreaming strategy would improve household welfare in rural areas.

Key words: *woman empowerment, role, strategy, gender mainstreaming, agricultural development, rural*

ABSTRAK

Paradigma modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang mengutamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan pada masyarakat petani, baik struktur sosial, budaya dan politik terutama pada struktur ekonomi di perdesaan. Hal tersebut juga menimbulkan gejala disintegrasi dan diskriminasi dalam "pembagian kerja" antara pria dan wanita di berbagai bidang, yang dikhawatirkan dapat meminggirkan bahkan menghilangkan fungsi produksi kaum wanita. Makalah ini bertujuan mengemukakan berbagai pemikiran (teoritis) tentang peran dan peluang wanita tani, serta memposisikan kembali strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam strategi kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. Peran ganda wanita tani membuktikan sangat penting dan strategisnya pola nafkah ganda, sebagai upaya meningkatkan pendapatan. Potensi wanita tani, sebagai isteri dan ibu rumah tangga, merupakan faktor penting penentu keberhasilan strategi pengarusutamaan gender tersebut. Pemberdayaan perlu dilakukan melalui teknologi tepat guna dan inovatif, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, dan tingkat upah, pelatihan dan pembinaan ketrampilan industri rumah tangga. Kesempatan kerja agar berimbang antar gender dan mengikutsertakan mereka dalam segala kegiatan pembangunan. Pemberdayaan wanita melalui strategi pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*), untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga petani di perdesaan.

Kata kunci : *pemberdayaan wanita, peran, strategi, pengarusutamaan, pembangunan pertanian, perdesaan*

PENDAHULUAN

Paradigma modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang mengu-

tamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan pada masyarakat petani, baik struktur sosial, budaya dan politik, maupun struktur ekonomi di perdesaan. Pembangunan pertanian di per-

desaan tersebut telah menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun belum sepenuhnya diimbangi peningkatan pendapatan rumah tangga petani seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan laju pergeseran ekonomi sektoral yang lebih cepat dibanding laju pergeseran tenaga kerja; dimana titik balik untuk aktivitas ekonomi di Indonesia lebih dulu tercapai dibanding titik balik penggunaan tenaga kerja (*labor turning point*) (Manning, 2000)

Perubahan yang terjadi terutama berkaitan erat dengan pola penguasaan dan pengusahaan lahan, struktur kesempatan kerja dan berusaha serta pola hubungan kerja; yang akhirnya bermuara pada struktur pendapatan petani di perdesaan (Elizabeth, 2007a). Beberapa penelitian memperkirakan bahwa lebih dari 23.100 ha lahan di Jawa telah terkonversi ke penggunaan di luar pertanian (Sumaryanto *et al.*, 1994). Tingginya kebutuhan akan lahan sebagai dampak pesatnya industrialisasi dan kebutuhan prasarana ekonomi serta pemukiman, mengakibatkan lahan pertanian produktif semakin menyempit, sementara pencetakan lahan pertanian baru belum sebanding dengan kebutuhan.

Sebagai negara agraris, aktivitas pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas angkatan kerja di Indonesia. Sektor pertanian diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, serta mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Meski demikian, sektor pertanian dan lapangan kerja primer mengindikasikan keterbatasan penyerapan tenaga kerja wanita. Apalagi masuknya teknologi pertanian dan timbulnya berbagai pranata baru yang mengatur hubungan antar pemilik lahan dan penyakap, penyewa, dan buruh tani, menjadikan semakin terdesaknya posisi wanita tani.

Keberhasilan pembangunan pertanian yang belum optimal, salah satunya ditengarai akibat belum optimalnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sehingga mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Maju mundurnya suatu negara dan bangsa sangat ditentukan keunggulan kualitas dan daya saing SDM-nya. Telah terbukti bahwa meski dengan sumberdaya alam (SDA) terbatas, namun dengan keung-

gulan SDM-nya, suatu negara mampu mencapai kesejahteraan yang tinggi.

Perbaikan dan peningkatan kualitas SDM bersifat multi dimensi, baik pendidikan, ketrampilan, kesempatan kerja dan berusaha, maupun gizi dan kesehatan. Faktor-faktor ini juga yang harus dikembangkan untuk memperkuat gerakan *gender mainstreaming* dalam kebijakan pembangunan pertanian. Kesemuanya ini berkaitan erat dengan peran, tugas, dan fungsi serta kedudukan wanita dalam strategi pembangunan pertanian melalui upaya pemberdayaan wanita tani di perdesaan. Tingkat adopsi inovasi teknologi terhadap kaum wanita relatif rendah. Untuk itu, Badan Litbang Pertanian membentuk tim inti untuk meningkatkan kapasitas para peneliti dan penyuluh di lingkungannya melalui program Sosialisasi dan Pelembagaan Analisis Sosial Ekonomi dan Gender (*Socio-economics and Gender Analysis=SAGA*).

Dengan penerapan adopsi inovasi yang lebih partisipatif, salah satunya melalui SAGA, terjadi peningkatan peran jender dalam strategi kebijakan pembangunan. Tulisan ini bertujuan mengemukakan dan mengkaji berbagai aspek dan pemikiran tentang upaya pemberdayaan wanita tani untuk meningkatkan peran, fungsi dan kedudukan mereka sebagai pendukung strategi pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*) dalam kebijakan pembangunan pertanian.

KEKHASAN ENTITAS SOSIAL WANITA: TERKAIT PERAN DAN KEDUDUKAN SERTA POTENSI DAN PELUANG

Peran dan kedudukan merupakan dua aspek penting dalam hubungan sosial masyarakat. Peran merupakan perilaku individu dalam struktur sosial, dan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yang akhirnya akan memberikan fasilitas tertentu sesuai dengan peranan (*role*) tersebut. Sedangkan posisi mengindikasikan status sosial individu di masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan memberikan seseorang sebuah peran sebagai pola interaksi dalam bersosialisasi (bermasyarakat). Seseorang dinilai telah berperan, bila mana ia telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya.

Potensi yang dimiliki individu, akan berkaitan kemampuan mengakses dan memanfaatkan peluang yang ada. Masyarakat belum tentu memberi peluang yang seimbang meski seseorang mampu berperan sesuai peranannya. Bahkan masyarakat seringkali "terpaksa" membatasi peluang-peluang tersebut, seperti halnya yang terjadi pada kaum wanita tani di pedesaan, karena keterkaitannya dengan potensi diri. Potensi membuat individu mampu berperan sesuai ataupun tidak dengan kedudukannya, karena merupakan daya dukung yang dimiliki secara khas oleh masing-masing individu.

Perubahan peran dan status wanita umumnya disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan wilayah di lingkungannya. Perubahan masyarakat tersebut makin dipacu oleh pertumbuhan ekonomi, akibat beralihnya sistem perekonomian dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan sosial dan budaya masyarakatnya. Perkembangan ekonomi dan sosial menimbulkan desintegrasi pembagian kerja antar jender yang secara tradisional telah terbentuk sejak dulu. Pola kerja produktif yang baru antar ataupun lintas jender mengarah pada diskriminasi pembagian kerja antar pria-wanita (Sajogyo, 1984). Selama masa transisi tersebut, bukan suatu keniscayaan bilamana berbagai fungsi produktif wanita tani akan tercabut, yang berdampak pada perlambatan proses pertumbuhan pembangunan pertanian.

Dalam semua strata, terindikasi bahwa peran dan status wanita dalam mengurus keberlangsungan rumah tangga lebih tinggi dibanding pria (kepala keluarga). Dominasi peran dan status tersebut menunjukkan tingginya potensi wanita untuk mengendalikan dan mengarahkan rumah tangganya, ke arah lebih baik atau menjadi semakin buruk. Hal tersebut diperkuat bahwa pada kenyataannya lebih 50 persen dari total penduduk Indonesia adalah wanita (BPS, 1990-2006), dimana lebih dari 70 persen (atau sekitar 82,6 juta orang) berada di pedesaan dan 55 persen di antaranya hidup dari pertanian (Elizabeth, 2007b).

Data tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi wanita tani sebagai tenaga kerja yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Meski demikian, dominasi peran wanita tersebut berpeluang untuk mengalami peru-

bahan, misalnya yang terjadi pada suami berstatus duda. Pada kondisi tersebut, mengatur dan menstabilkan kebutuhan rumah tangga akan dikendalikan oleh suami (meski terdapat anak perempuan yang sudah dewasa, saudara perempuan, ataupun ibu kandung/mertua sekalipun). Perbedaan status/posisi setiap anggota rumah tangga merupakan pengkajian diferensiasi peranan, berdasarkan perbedaan umur, jenis kelamin, status perkawinan, status/posisi sosial ekonomi, generasi, ataupun kekuasaan. Perbedaan tersebut merupakan analisis struktural, yang sebagian besar disebabkan oleh alasan biologis dan sosial budaya lingkungan suatu rumah tangga.

Teridentifikasi bahwa pada dasarnya wanita memiliki peranan ganda dalam rumah tangga. Peran ganda kaum wanita tersebut terimplikasi pada: (1) peran kerja sebagai ibu rumah tangga (mencerminkan *feminine role*), meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang); dan (2) berperan sebagai pencari nafkah (tambahan ataupun utama).

Dalam pengembangan citra dan prospek wanita abad XXI, terbentuk beberapa peran, antara lain: (1) *Peran tradisi*, yang menempatkan wanita dalam fungsi reproduksi, dimana seratus persen hidupnya untuk mengurus keluarga, dan patron pembagian kerja jelas (wanita di rumah/domestik, pria di luar rumah/publik); (2) *Peran transisi*, mengutamakan peran tradisi lebih dari yang lain, pembagian kerja menurut aspirasi jender, keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggungjawab kaum wanita; (3) *Dwiperan*, memposisikan wanita dalam dua dunia kehidupan (peran domestik-publik sama penting), dukungan moral dan perhatian suami menjadi pemicu ketegaran ataupun keresahan; (4) *Peran egalitarian*, kegiatan di publik menyita waktu dan perhatian wanita, dukungan moral dan tingkat kepedulian pria sangat hakiki untuk menghindari konflik; (5) *Peran kontemporer*, merupakan dampak pilihan wanita untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlah golongan ini belum banyak, namun berbagai benturan dari dominasi pria (yang belum tentu peduli pada kepentingan wanita) akan meningkatkan populasinya (Vitayala dalam Hastuti, 2004).

Pada era globalisasi, peran transisi dan egalitarian diprediksi akan menimbulkan

berbagai kondisi, yaitu: (1) dengan potensi dan kemampuan sebagai indikator penentu, kejelasan penajaman peran pria dan wanita akan memudar sehingga tidak jelas lagi pembedanya; (2) wanita pekerja akan meningkat sedangkan pria pengangguranpun akan meningkat; (3) mobilitas sosial dan geografis memisahkan tempat tinggal suami-isteri, orangtua-anak, sehingga keluarga menjadi tidak utuh (Vitayala, 1995). Berbagai kemungkinan tersebut mengindikasikan wanita dan pria dapat berperan setara, sebagai pencari nafkah di berbagai bidang, kegiatan rumah tangga, dan dalam bersosialisasi di masyarakat (Elizabeth, 2007b).

MARGINALISASI JENDER WANITA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pembangunan pertanian di perdesaan telah menyebabkan gejala modernisasi dan urbanisasi serta berbagai perubahan sosial ekonomis dalam masyarakatnya. Terjadinya perubahan dalam sistem nilai sosial, norma dan tatalaku, serta pola hubungan antar pria-wanita. Ironisnya, keadaan tersebut juga menimbulkan terjadinya gejala desintegrasi dan diskriminasi dalam "pembagian kerja" antara pria dan wanita di berbagai bidang. Hal ini secara empiris terlihat nyata pada keadaan tenaga kerja wanita di berbagai bidang. Kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai suatu permasalahan dan kendala dalam proses pembangunan, karena dikhawatirkan dapat meminggirkan bahkan menghilangkan fungsi peran kaum wanita dalam berproduktivitas, atau terjadinya marginalisasi peran wanita.

Berbagai penelitian telah dilakukan dan berbagai laporannya telah dihasilkan, namun manfaatnya belum dinikmati kaum wanita secara adil, bahkan cenderung merugikan (Siwi dan Manwan, 1991). Topik penelitian bervariasi meliputi alokasi dan distribusi waktu dan tenaga kerja wanita tani dalam aktifitas usahatani, tingkat pengambilan keputusan, pemasaran hasil, *income generating activities*, dan sebagainya. Di sektor pertanian, wanita yang turut bekerja di usahatani, tidak dianggap berprofesi sebagai "petani", tetapi hanya sebagai isteri (anggota keluarga) petani, yang wajib membantu segala pekerjaan suami (petani). Pria dan wanita di perdesaan, layaknya

kehidupan manusia, bersama-sama berdampingan bekerja di usahatani mereka, namun kesenjangan wanita tani masih tetap ada, terutama dalam menggali potensi dan kemampuan mereka.

Dampaknya adalah terjadinya marginalisasi kaum wanita tani, dimana kaum wanita tani selalu tertinggal dibanding kaum pria. Perencanaan pembangunan pertanian di masa lalu, bukan mustahil secara tidak sengaja telah mengabaikan peran kaum wanita tani tersebut (Elizabeth, 2007b). Keteledoran tersebut menyebabkan posisi kaum wanita makin terjepit dan terkungkung dalam dimensi keterbatasan. Secara internal, keterbatasan wanita tercermin pada lebih rendahnya pendidikan, ketrampilan, rasa percaya akan kemampuan dan potensi diri. Secara eksternal, keterbatasan tersebut tercermin pada lebih rendahnya akses wanita menangkap berbagai peluang di luar rumah tangganya.

White dan Hastuti (2004) melihat hubungan pria dan wanita dalam masyarakat agraris sebetulnya mencerminkan: *Pertama*, kedudukan yang "berbeda tapi setara", dimana pria-wanita berperan untuk kepentingan bersama dan saling melengkapi. Pemisahan peran dan pengaruh antar jender bersifat komplementer, dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dalam rumah tangga dan masyarakat. Meski diakui dan dibenarkan, serta dianut dalam berbagai program pembangunan dan berbagai ideologi/norma masyarakat, namun implementasinya bahkan bertolak belakang. Manfaat terbesarnya hanya dinikmati oleh satu jenis kelamin saja (pria). *Kedua*, kedudukan yang "berbeda dan tidak setara", merupakan dua pandangan yang saling bertentangan, yang mencerminkan "kekuasaan wanita nyata tapi tersembunyi", dan terdapatnya "penundukkan (intimidasi/ penindasan) wanita nyata tapi tersembunyi" (Hastuti, 2004).

Berbagai keterbatasan yang mencerminkan marginalisasi wanita tersebut terlihat dalam mengakses pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha serta inovasi teknologi, diskriminasi tingkat upah, jenis dan nilai pekerjaan (bekerja pada lapisan terbawah), pekerjaan yang tersegregasi oleh gender, keterbatasan akses wanita buruh ataupun pengusaha dibanding pria, nilai status sosial pekerja wanita ("lupa kodrat" bahwa wanita

seharusnya hanya mengurus rumah tangga), ketidakhomogenan wanita dalam keterlibatannya di sektor nonpertanian, ketertinggalan wanita dalam penentuan dan pengambilan keputusan, dan berbagai dimensi lainnya. Padahal, dalam era globalisasi sekarang ini, daya saing ekonomi semakin rumit, kesulitan mendapat pekerjaan semakin terbatas dan tingginya kompetisi kesempatan kerja dan berusaha, dan bentuk-bentuk keluarga semakin kecil (dampak rekayasa dan desiminasi inovasi alat kontrasepsi).

Bias jender di pertanian dan perdesaan, tidak terlepas dari perspektif klasik dalam cara memandang wanita tani yang timpang dan diskriminatif dengan kewajiban yang mengungkung dan menjebak mereka di dalamnya. Nuansa klasik dari ketertindasan kaum wanita tani di tengah kerasnya kehidupan di sektor pertanian merupakan isu berdimensi jender di sektor tersebut. Di samping itu, peran ganda yang mereka lakoni juga mencerminkan ketertindasan kaum wanita; karena selain sebagai ibu rumah tangga (sektor domestik), mereka juga dituntut dapat mencari nafkah (sektor publik) untuk mengurangi beban ekonomi dan kehidupan rumah tangga. Tata nilai dan adat istiadat sangat berperan dalam membicarakan peran, khususnya peluang dan potensi wanita tani di sektor pertanian. Penetrasi teknologi baru (bibit unggul, huller/tresher, mekanisasi pengolahan lahan, dan herbisida) telah mengurangi dan menggeser kesempatan kerja wanita tani di perdesaan.

Kebijakan pembangunan pertanian berdimensi jender, antara lain meliputi: (1) legitimasi peranan wanita tani dengan berbagai aspeknya; (2) terdapatnya pemahaman yang lebih baik terhadap peran wanita dan pria dalam aktivitas produksi; (3) minimnya identifikasi kebutuhan wanita perdesaan dalam pembangunan pertanian akibat keterbatasan pemahaman petugas lapang akan jender, tujuan dan analisisnya; 4) perencana dan pengambil kebijakan belum menganggap isu jender sebagai masalah yang perlu dikaji; (5) nilai sosial budaya yang kurang mendukung keberadaan wanita tani yang mengakibatkan pembuat kebijakan menjadi "bias jender", sehingga terjadi pembatasan kesempatan dan peluang wanita tani untuk mengakses berbagai sumberdaya pertanian (fasilitas kredit,

informasi, ilmu, dan teknologi); (6) diskriminasi kesempatan kerja dan tingkat upah wanita dan pria untuk jenis pekerjaan yang sama ditunjukkan oleh data statistik ketenagakerjaan; dan (7) masih kurang memadainya teknologi tepat guna bagi wanita tani (Siwi *et al.*, 2000).

PEMBERDAYAAN WANITA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MENDUKUNG STRATEGI GENDER MAINSTREAMING

Pemberdayaan Wanita

Selain dari tingginya potensi dan peluang wanita sebagai tenaga kerja (BPS, 1990-2006), besarnya harapan untuk peran wanita tani juga tercermin dari makin rumit dan sulitnya ekonomi rumah tangga petani di perdesaan karena makin sempitnya lahan usahatani. Semakin terbatasnya lahan usahatani produktif merupakan dampak tingginya konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan nonpertanian, sebagai konsekuensi ledakan penduduk dan peningkatan nilai ekonomi akibat tingginya permintaan lahan untuk prasarana industri, perdagangan serta pemukiman. Di sisi lain, laju pergeseran ekonomi sektoral relatif lebih cepat dibanding laju pergeseran tenaga kerja; dimana titik balik untuk aktivitas ekonomi di Indonesia lebih dulu tercapai dibanding titik balik penggunaan tenaga kerja (*labor turning point*) (Manning, 2000)

Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha menunjukkan betapa perlu dan pentingnya pemberdayaan kaum wanita agar mampu menghasilkan SDM dalam rumah tangga sebagai tenaga kerja dan generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas akses terhadap suatu kondisi untuk mendorong kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan kritis terhadap perubahan) serta mampu berperan aktif dalam menentukan nasibnya sendiri, melalui penciptaan peluang yang seluas-luasnya agar mampu berpartisipasi (Sumodiningrat, 1999). Dengan mengimplementasi pemikiran Sumodiningrat (1997 dan 1999), sedikitnya ada tiga aspek yang dicakup dalam memaknai pemberdayaan wanita, yaitu: (1) menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengem-

bangkan potensi wanita; (2) memperkuat potensi (modal) sosial wanita demi meningkatkan mutu kehidupannya; (3) mencegah dan melindungi wanita, serta mengentaskan ketertindasan dan kemarginalan segala bidang kehidupan mereka.

Upaya menciptakan suasana/iklim kondusif yang memungkinkan suatu potensi dapat berkembang dan menguat dengan cara: (1) mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki; (2) menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya; dan (3) diperlukan *tindakan perlindungan* terhadap potensi sebagai bukti *keberpihakan* yang mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat. Pemberdayaan (*empowerment*) wanita merupakan upaya penguatan terhadap ketidakberdayaan mereka agar mampu menolong diri sendiri, mandiri, serta mengembangkan semangat *self-reliance*-nya.

Terkait dengan pemberdayaan wanita, peran dan potensi mereka sangat dibutuhkan, dan strategis kedudukannya serta mulia nilainya dalam mengatur dan mengurus sumberdaya keluarga, terutama anak-anak, dan sumberdaya material rumah tangga lainnya. Anak-anak merupakan faktor utama sumberdaya manusia, sebagai calon generasi penerus. *Self-reliance* wanita, sebagai ibu rumah tangga, tercermin pada usaha memaksimalkan kemampuan mereka mempersiapkan anak-anak untuk mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari orangtuanya kelak, melalui pembekalan pendidikan dan ketrampilannya, di samping pembinaan ahlak dan martabat mereka.

Pada kondisi tersebut, dengan memberi pendidikan yang terbaik untuk kaum wanita, maka suksesnya suatu rumah tangga (terutama masa depan anak-anak/generasi penerus), sangat tergantung pada kemampuan dan potensi memadai dari wanita, sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Dengan kata lain, berkaitan dengan keberadaan dan ketersediaan sumberdaya manusia (generasi penerus) berkualitas dan berdaya saing tinggi di masa depan; maka strategi pengarusutamaan wanita (*gender mainstreaming*) sangatlah logis dan layak dialiniasi dan diaktualisasi, serta diposisikan di tempat utama dalam setiap strategi

kebijakan pembangunan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui pemberdayaan (*empowerment*) mereka dalam semua sektor. Oleh karena itu diperlukan inovasi dan adopsi teknologi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan dan potensi kaum wanita.

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang wanita tani. Dalam pembangunan pertanian, pemberdayaan wanita tani merupakan proses transformasi yang lebih aplikatif untuk mampu menangkap berbagai perubahan alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi manfaat, dan akumulasi dalam upaya meningkatkan produksi, pendapatan rumah tangga, serta adopsi dan penyebaran teknologi. Pemberdayaan wanita juga merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya, mengentaskan keterbatasan pendidikan dan ketampilan mereka, dan mengentaskan mereka dari ketertindasan akibat perlakuan yang diskriminatif dari berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pengembangan pembinaan dan peningkatan efektivitasnya, baik sebagai anggota rumah tangga maupun sebagai pengusaha mandiri, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, dan tingkat upah, pelatihan dan pembinaan ketrampilan industri rumah tangga, serta kesempatan kerja agar berimbang antar jender dan mengikutsertakan mereka dalam segala kegiatan pembangunan. Pemberdayaan wanita di segala bidang sangat diperlukan mendukung strategi *gender mainstreaming* wanita pada kebijakan pembangunan pertanian.

Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kajian dan pemahaman tentang jender berhubungan erat dengan perlakuan, gagasan, konstruksi budaya, bahkan teknologi bias jender (IRRI, 1987). Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural (Caplan, 1978). Kesadaran jender berarti pria dan wanita bekerja sama dalam suatu keharmonisan cara,

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan JDP dan WDP dalam Pengarusutamaan Gender

ASPEK	JDP	WDP
Pendekatan	Model pembangunan yang menjadi sumber masalah	Dalam pembangunan, wanita dianggap sebagai beban
Fokus	Pola relasi pria-wanita	Wanita
Masalah	Relasi kekuasaan yang timpang (kaya-miskin, pria-wanita, negara-masyarakat) yang menyebabkan pembangunan tidak adil yang tidak mengikutsertakan wanita secara optimal	Proses pembangunan tidak mengikutsertakan wanita
Tujuan	Pembangunan yang adil dan berkesinambungan, dengan pria dan wanita sebagai pengambil keputusan	Pembangunan yang lebih efektif dan merata
Solusi	Pemberdayaan wanita marginal. Mengubah pola relasi pria-wanita yang tidak seimbang.	Mengintegrasikan wanita dalam proses pembangunan dan memberdayakan wanita yang tersisih dari pembangunan
Strategi	Mengidentifikasi kebutuhan praktis sesuai yang diformulasikan pria dan wanita untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.	Memasukkan unsur wanita dalam semua aspek perencanaan proyek.
	Menangani kepentingan strategis wanita.	Berbagai proyek khusus untuk wanita.
	Menangani kepentingan strategis golongan miskin melalui pembangunan untuk manusia dan wanita secara terpisah.	Meningkatkan produktivitas wanita.
		Peningkatan ketrampilan wanita dan melaksanakan peran tradisi (rumah tangga/domestik)
		Mengurangi beban kerja tradisi wanita

Sumber: Hastuti (2004), diimplementasi penulis dari berbagai literatur.

memiliki kesamaan dalam hak, tugas, posisi peran dan peluang (kesempatan), dan menaruh perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik yang melengkapi dan memperkuatnya (Vitayala, 1995). Gender merupakan pemilahan peran dan hubungan antara pria dan wanita, bagian konsepsi pengorganisasian "pembagian kerja", baik dalam keluarga, rumah tangga, masyarakat luas, dan merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya, dimana keberbedaan keduanya adalah sebuah keniscayaan.

Pemilahan tersebut dilakukan melalui: (1) Teori kodrat alam (*nature*). Berbagai perbedaan pria-wanita berdasarkan alat tubuh dan sifat yang melekat di keduanya secara alami maupun kewajiban kodrati. Pekatnya nilai alami wanita dalam status sosial masyarakat, menyebabkan penilaian *punishment* pada wanita yang beraktifitas di luar rumah tangga, karena dianggap menyalahi kodrat. Sangsi dan pikiran-pikiran seperti ini dinilai "mengada-ada" oleh Tjandraningsih (1996), karena apabila terjadi ketidakseimbangan atas dasar perbedaan hak, maka produktivitas masyarakat akan terhambat, sehingga akan mengakibatkan perlambatan laju pembangun-

an (Elizabeth, 2007b); (2) Teori kebudayaan (*culture*), mengkaji perbedaan berdasarkan anatomi dan fungsi bagian tubuh keduanya yang berkonsekuensi pada perangai psikologisnya; (3) Teori fungsionalisme struktural yang mengacu pada keharmonisan suatu sistem sosial dan keharusan menjaga tertib sosial untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan; dan (4) Teori psikoanalisis yang mengurai perbedaan melalui rasa ketidakpuasan wanita (kecemburuan) terhadap dampak kekurangan "alat" miliknya dibanding milik pria. Teori ini kurang layak dan agak fenomenal, sehingga jarang digunakan karena menuai banyak sanggahan.

Analisis gender merupakan alat analisis konflik yang difokuskan pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Vitayala (1995) mengemukakan perlunya pendekatan JDP (Gender Dalam Pembangunan) dan pendekatan WDP (Wanita Dalam Pembangunan) dalam setiap program pembangunan. Perbandingan kedua pendekatan tersebut (Tabel 1) mencerminkan bahwa pendekatan JDP mendesain program yang mengintegrasikan dan mengarusutamakan (*memainstreamkan*)

aspirasi, kebutuhan, dan minat jender, sehingga pengembangan perencanaan dan implementasi program lebih banyak mencakup kebutuhan strategis jender. Pendekatan WDP didesain untuk menjembatani kesenjangan pria-wanita dalam semua aspek pembangunan.

Muncul dan berkembangnya berbagai gerakan wanita dan disiplin tentang studi wanita, mempengaruhi perkembangan teori-teori feminis yang berkaitan erat dengan isu jender. Teori feminis menekankan institusi dan tindakan sosial yang meliputi tradisi feminis liberal, feminisme Marxis, feminisme radikal, feminisme sosial, serta dua konsep yang lebih baru dan sedang "booming" penggunaannya, yaitu: feminisme kultural dan feminisme struktural, meskipun keduanya memiliki keterbatasan dalam wacananya. Jender dapat berubah antar waktu, tempat dan kelas sosial ekonomi masyarakat, namun jenis kelamin (sex) tidak berubah (Fakih, 1996).

Perbedaan jender (jenis kelamin) disebabkan oleh alasan biologis dan lingkungan sosial budaya suatu rumah tangga, dianalisis secara struktural dan merupakan pengkajian diferensiasi peranan, meliputi perbedaan umur, generasi, status sosial ekonomi, ataupun kekuasaan (*power*) (Paris, 1987). Pola nafkah ganda yang pernah dipopulerkan oleh Sajogyo, telah membuktikan manfaat positif peran ganda wanita, bukan hanya cerminan marginalisasi kaum wanita saja. Pola nafkah ganda berupa: (1) pencari nafkah tambahan atau utama (*income earning work*) dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga; maupun (2) sebagai ibu rumah tangga (mencerminkan *feminine role*), yang meski tidak langsung menghasilkan pendapatan (uang), namun secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan.

Pekerjaan mengurus dan mengatur rumah tangga (*domestic work*), meski tidak memberi penghasilan langsung, pada dasarnya merupakan pekerjaan yang *ekonomis produktif*. Hal ini terbukti bilamana pelaksanaannya digantikan (diintegrasikan) pihak jasa tenaga kerja bayaran (*paid worker*) yang diberi imbalan, berupa gaji (upah) sesuai ketentuan yang berlaku dalam masyarakat atau pemerintah (UMR), atas pekerjaannya mengurus suatu rumah tangga. Sebagai anggota rumah tangga petani, wanita tani berperan aktif dalam mem-

bantu aktivitas usahatani dan mencari nafkah di subsektor *off* dan *non farm*. Semakin rendah tingkat ekonomi suatu rumah tangga petani, makin besar curahan tenaga dan waktu wanita tani dalam upaya memperoleh pendapatan keluarga (Elizabeth, 2007b).

Sumbangan pendapatan (nilai ekonomi) yang diperoleh kaum wanita tani dari pola nafkah ganda terbukti cukup besar dalam penghasilan keluarga. Penghasilan tersebut diperoleh baik dengan bekerja di lahan usahatani sendiri, sebagai buruh tani, maupun sebagai tenaga kerja di luar sektor pertanian. Meski demikian besar peran dan sumbangan kaum wanita, belum memprioritaskan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak (Soemartoyo, 2002 dalam Hastuti, 2004.).

Gender mainstreaming (pengarusutamaan jender) bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat mempertimbangkan kesempatan dan akses wanita terhadap program pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi wanita. Dengan demikian, diperlukan pembinaan peran wanita tani agar mampu meningkatkan peran dan potensi mereka, terutama produktivitasnya melalui pemberdayaan mereka di segala bidang.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Marginalisasi kaum wanita tercermin pada ketertindasan dan perlakuan diskriminatif "pembagian kerja" (jenis kerja, waktu/tenaga yang tercurah, dan tingkat upah), yang wanita terima dari berbagai kalangan/lingkungan. Ketertindasan tersebut hendaknya dinilai secara positif dan inovatif dengan memaknainya sebagai tantangan dan peluang. Wanita sebagai ibu rumah tangga merupakan peran dan potensi yang memiliki peluang sangat strategis dalam menghasilkan SDM (anak-anak sebagai generasi penerus) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selain itu, kontribusi wanita sebagai pencari nafkah dapat diartikan sebagai peluang untuk meningkatkan potensi dan produktivitas mereka sebagai tenaga kerja, dalam upaya meningkatkan pendapatan, khususnya rumah tangga petani di perdesaan.

Pemberdayaan wanita merupakan proses transformasi yang lebih aplikatif untuk menangkap berbagai perubahan alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi manfaat, dan akumulasi untuk meningkatkan produksi dan pendapatan rumah tangga. Pemberdayaan wanita di segala bidang, sejalan dengan upaya mendukung strategi pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan pertanian.

Diperlukan pemberdayaan (*empowerment*) wanita sebagai upaya untuk peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya, mengentaskan mereka dari keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, dan ketertindasan akibat perlakuan yang diskriminatif dari berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya. Diperlukan pula peningkatan daya serap dan adopsi teknologi sebagai strategi pemberdayaan wanita dalam segala proses pembangunan melalui peningkatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan, teknologi tepat guna dan inovatif. Pemberdayaan wanita dicapai melalui perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, dan upah, serta kesempatan kerja agar berimbang antar jender sebagai insentif dan keberpihakan terhadap kaum wanita tani di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (1990-2006). Data Kependudukan. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Caplan. 1978. The Cultural Construction of Sexuality. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4 Nopember 1996. AKATIGA. Bandung
- Elizabeth, R. 2007a. Remitansi Bekerja dari Luar Negeri dan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Pedesaan. Tesis. IPB. Bogor.
- Elizabeth, R. 2007b. Peran Ganda Wanita Tani sebagai Pelaku Usaha Mencapai Strategi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Perdesaan. (sedang proses publish). Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Fakih, M. 1996. Gender sebagai Alat Analisis Sosial; dalam: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4 Nopember 1996. AKATIGA. Bandung.
- Hastuti, E. L. 2004. Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif Gender. Working Paper. No.50 Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- International Rice Research Institute (IRRI). 1987. Woman in Rice Farming Systems: An Operational Research and Training Program. Training and Workshop Gender Analysis. November 1993. IRRI. Manila. Philippines.
- Manning, Chris. 2000. Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: Context, Trend, and Implications. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES). Vol.36. No. 1. April 2000: p.105-136. ANU Canberra.
- Paris, T. R. 1987. Women in Rice Farming System: A Preliminary Report of an Action Research Program in Sta. Barbara. Pangasinan. IRRI. Los Banos. Philippines.
- Sajogyo, P. 1984. Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi. Obor. Jakarta.
- Sajogyo, P. 1992. Konsepsi dan Metodologi dalam Studi Peranan dan Status Sosial Wanita dalam Keluarga, Rumah Tangga, dan Masyarakat; dalam Peranan Wanita dalam Usahatani. Prosiding Lokakarya Gender Analysis dalam Sistem Usahatani. Bogor: 6-12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
- Siwi, S. S., dan I. Manwan. 1991. Women in Rice Farming Activities in Indonesia. 22nd Asian Rice Farming System Working Group Meeting, Beijing, China: 198-218.
- Siwi, S.S., F. Sulaiman, E. Basuno, R. N. Suhaeti, Rochlini and C. P. Pelzer. 2000. Socio-economic & Gender Analysis (SAGA) in Agricultural Research and Development Programme. SAGA Core Team, AARD. Jakarta.
- Sumaryanto, R. Elizabeth, S. Pasaribu, A. Taryoto, B. Sayaka. 1994. Studi Dinamika Penguasaan Lahan dan Kesempatan Kerja. PATANAS. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rina Pariwara. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia. Jakarta.

Tjandraningsih, I. 1996. Mengidentifikasi Persoalan Perempuan *dalam* Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4 Nopember 1996. AKATIGA. Bandung.

Vitayala, A. S. 1995. Posisi dan Peran Wanita dalam Era Globalisasi *dalam* E. L. Hastuti, 2004. Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif Gender. Working Paper No. 50. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.